



Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional

Sub: Penguatan Organisasi

Kementerian Pendidikan Nasional
2010

Cetakan Periode Oktober 2010.

Dokumen ini dapat digunakan, disalin, disebarluaskan baik sebagian ataupun seluruhnya dengan syarat mencantumkan sumber asli.



Pengantar

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di bidang pendidikan 2005-2025 telah menetapkan peningkatan kualitas layanan sebagai fokus utama.
- Sejalan dengan fokus tersebut dan memperhatikan persoalan, tantangan, peluang dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 2010-2014, serta harapan masyarakat terutama yang terkait pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan. Hal tersebut mengharuskan Kemdiknas melakukan reformasi dalam melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional.
- Sebenarnya reformasi ini telah dimulai sejak Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama antara lain melalui pembiayaan pendidikan, perbukuan dan sistem perencanaan. Dan Kemdiknas termasuk salah satu dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yang dipilih menjadi *pilot project* reformasi birokrasi, yang dapat dipandang sebagai kelanjutan dari reformasi sistem perencanaan.
- Reformasi birokrasi mencakup hal yang lebih luas dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, karenanya waktu adalah sumberdaya kritikal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, mengingat reformasi birokrasi adalah salah satu agenda dalam Kontrak Kinerja Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

- ◉ Kementerian Pendidikan Nasional bertekad memanfaatkan momentum reformasi birokrasi ini sekaligus untuk melakukan **Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional** secara menyeluruh.

Jakarta, Oktober 2010

Menteri Pendidikan Nasional

Mohammad Nuh



Bagian I

Konsep Reformasi Kemdiknas



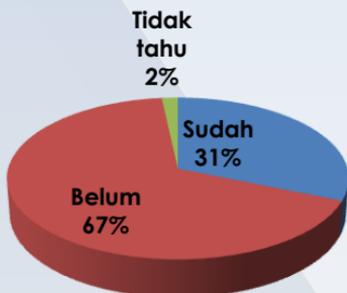
Tujuan

- Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dirancang oleh Kemdiknas untuk dapat melaksanakan **Misi 5K Kemdiknas (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan, dan Kepastian)** dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.
- Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan.
- Efisiensi nasional akan dapat tercapai apabila Kemdiknas bekerja secara efisien (efisiensi internal) dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh layanan dari Kemdiknas dengan cara yang efisien juga (efisiensi eksternal).
- Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila semua kegiatan Kemdiknas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak menyisakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pemberian layanan terbaik kepada semua pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam **Visi Kemdiknas 2014: Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif.**

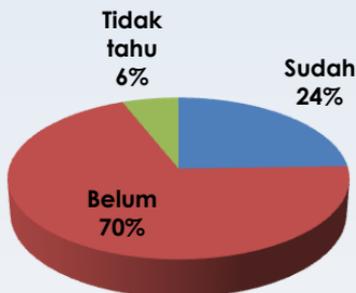


Persepsi Publik Terhadap Reformasi Birokrasi: Sudah Berjalan Baik/Belum?

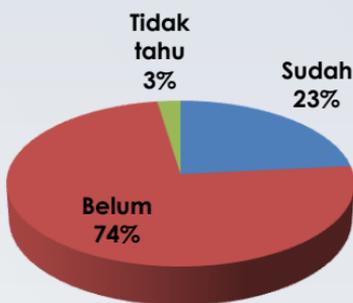
Ekonomi



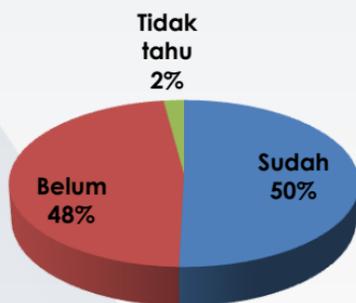
Politik



Hukum



Sosial



Sumber: Harian Kompas, 14 Mei 2010, hal. 35

Walaupun reformasi dalam bidang sosial, dimana pendidikan termasuk salah satunya, dianggap berjalan lebih baik dibanding bidang-bidang yang lain, tetapi hampir separuh dari publik masih belum puas



Pelaksanaan Reformasi Kemdiknas

- Telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007:
 - > Pembelian Hak Cipta Buku Teks
 - > Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE)
 - > Penyediaan Fasilitas Internet dan Multimedia di sekolah
 - > Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa, dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
 - > Dan lain-lain
- Hasil survey menunjukkan bahwa publik masih berharap reformasi birokrasi di bidang sosial (termasuk pendidikan) adalah lebih baik dari yang telah dilaksanakan sampai saat ini.
- Sejak tahun 2010, Kemdiknas telah melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan:
 - > Reformasi sistem Layanan dengan mengedepankan e-Layanan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui satu **Portal Layanan Prima Pendidikan Nasional**
 - > Penguatan Organisasi yang meliputi penajaman visi-misi-strategi, **restrukturisasi organisasi**, serta penataan tugas dan fungsi



Ruang Lingkup

- Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup:
 - Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal, yang diistilahkan sebagai **Reformasi Birokrasi**, dan
 - Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal yang diistilahkan sebagai **Reformasi Layanan**.
- Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada **Permenpan No. 15/2008** yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup:
 - Penguatan Organisasi,
 - Pembentukan Tata-laksana, dan
 - Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia
- Reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu pada pemanfaatan **Teknologi Informasi dan Komunikasi** sehingga layanan dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media apa saja.



Pendekatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas

**Manajemen Perubahan:
Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak**

Birokrasi Saat Ini

Penguatan Organisasi

Pembenahan Ketatalaksanaan

Penataan dan Penguatan SDM

Birokrasi Ideal

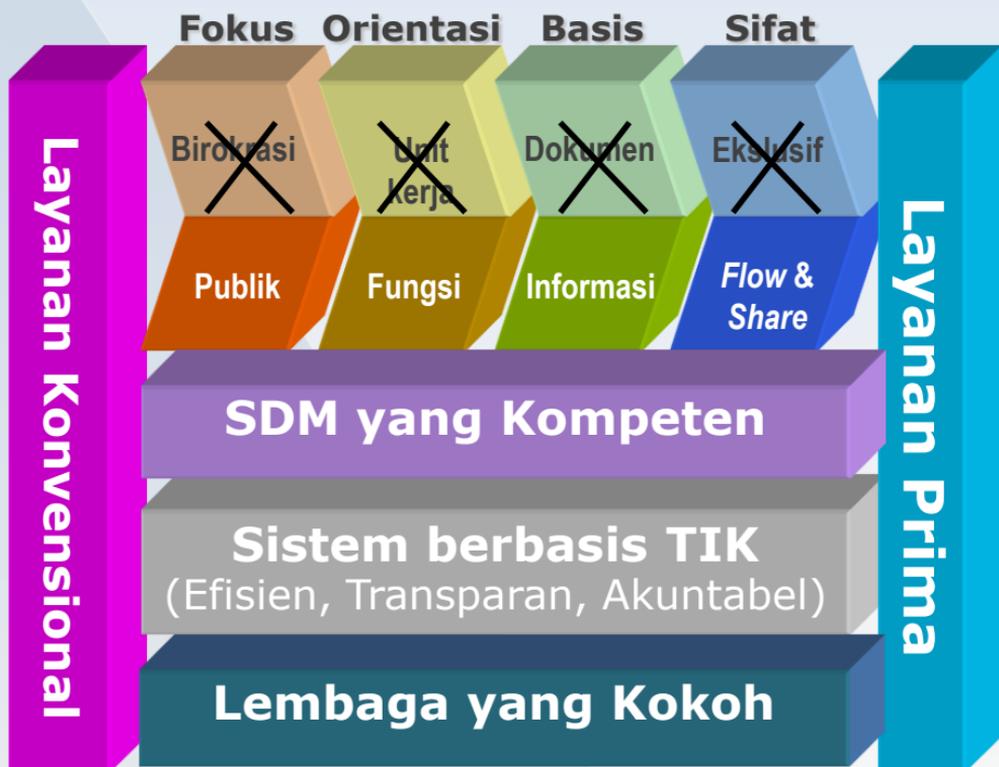
**Pengembangan Sistem:
Efisien, Transparan, Akuntabel**

Pemanfaatan TIK

Reformasi Birokrasi Kemdiknas, sesuai arahan MenPAN-RB, meliputi Penguatan Organisasi, Pembentukan Ketatalaksanaan, dan Penataan dan Penguatan SDM. Dalam pembentukan ketatalaksanaan, Kemdiknas melakukannya dengan melakukan pengembangan sistem melalui pemanfaatan TIK, sehingga dihasilkan proses yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam penataan dan penguatan SDM, dilakukan melalui manajemen perubahan budaya kerja melalui perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.



Pendekatan Reformasi Layanan Kemdiknas



Reformasi Layanan Kemdiknas dilakukan melalui reka-
yasa ulang proses layanan menjadi berfokus pada pu-
blik (yang dilayani), mengedepankan peran fungsi laya-
nan (bukannya unit kerja), dengan berbasis pada infor-
masi yang diperlukan untuk memberikan layanan (bu-
kan dokumen fisiknya), serta menekankan pentingnya
berbagi informasi dan aktivitas sehingga tidak perlu
terjadi pengulangan proses dan pendataan. Semuanya
ini dilakukan melalui penguatan dan penataan peran
SDM dan penyediaan dukungan sistem berbasis TIK.



Konsep Reformasi Kemdiknas

Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (**5K**)

Penguatan Organisasi

Penajaman Visi, Misi, Strategi

Restrukturisasi Organisasi

Redefinisi Tugas dan Fungsi

Analisis Beban Kerja dan Kualifikasi Jabatan

Pembinaan Tata-laksana

Rekayasa Ulang Proses Organisasi

Simplifikasi dan Integrasi Posedur

Pengembangan Sistem

Pengukuran Kinerja

Penataan dan Penguatan SDM

Perumusan Budaya Kerja

Manajemen perubahan

Peningkatan Kompetensi

Pengukuran Kinerja & Remunerasi

Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Reformasi Layanan Peserta Didik

Reformasi Layanan Pendidik & Tenaga Kependidikan

Reformasi Layanan Satuan Pendidikan

Reformasi Layanan Substansi Pendidikan

Reformasi Pelaksanaan Sisdiknas

Efisiensi internal, Transparansi, Akuntabilitas

Efisiensi eksternal Efektivitas organisasi Transparansi

Efisiensi Nasional



Agenda Reformasi Kemdiknas (I)

Agenda

Rencana Aksi

1. Penguatan Organisasi

Restrukturisasi Organisasi

Penataan Tugas dan fungsi

Analisis Beban Kerja

Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi

2. Penataan dan Penguatan SDM

Penerapan Budaya Kerja

Analisis dan Evaluasi Jabatan

Pemetaan dan Penempatan Jabatan

Peningkatan Kompetensi

Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja

Sistem Pengelolaan Kinerja Individu

3. Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem

Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Manajemen SDM

Sistem Manajemen Aset BMN (Barang Milik Negara)

Sistem Manajemen Dokumen

Sistem Informasi Produk Hukum

Sistem Manajemen Data Pendidikan

Sistem Manajemen Portal Layanan Pendidikan



Agenda Reformasi Kemdiknas (II)

Agenda	Rencana Aksi
4. Reformasi Layanan Satuan Pendidikan	
	Perijinan
	Akreditasi
	Mekanisme Ketepatan Pemberian Bantuan/Hibah
	Penentuan Standar Layanan
	Pemetaan Kondisi Sekolah, Daya Tampung dan Cakupan Layanan
	Pembukaan Sekolah Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja
	Layanan Informasi dan Pendataan
5. Reformasi Layanan Peserta Didik	
	Pemberian Beasiswa
	Mekanisme Penjaminan Ketepatan Penyaluran Beasiswa
	Pemberian Ijin Belajar
	Penyetaraan Ijazah
	Mekanisme Penjaminan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
	Pendataan Siswa dan Penduduk Usia Sekolah
	Layanan Informasi dan Pendataan



Agenda Reformasi Kemdiknas (III)

Agenda	Rencana Aksi
--------	--------------

6. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

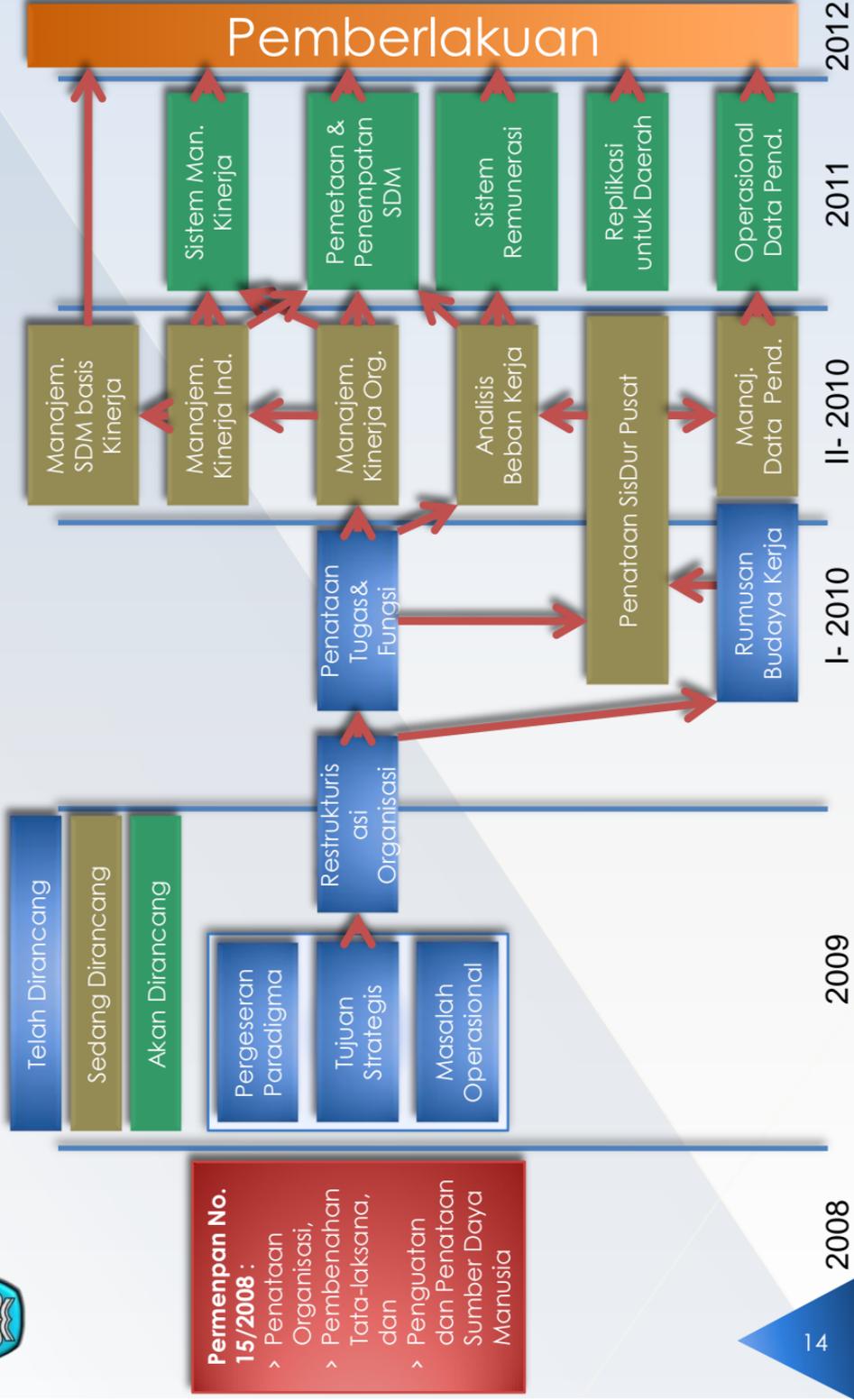
	Penerimaan dan Perencanaan Kebutuhan
	Mutasi (Kenaikan Pangkat, Jabatan, Pindah, ...)
	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
	Pensertifikasian
	Pendistribusian
	Penghargaan dan Perlindungan
	Penanganan PTK Layanan Khusus (Terpencil, Terluar, ..)
	Peningkatan Kesejahteraan (Inpassing, Tunjangan Nonsertifikasi, ...)
	Fasilitasi Layanan Internasional
	Layanan Informasi dan Pendataan

7. Reformasi Layanan Substansi Pendidikan

	Kolaborasi Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman
	Penyediaan & Penggalangan Materi e-Pembelajaran Bersama
	Layanan Informasi Kurikulum dan Pelaksanaannya
	Layanan Buku Sekolah elektronik
	Layanan Tutor Pembelajaran Online
	Layanan Materi dan Nilai Ujian Nasional
	Penyempurnaan Standard Isi Pendidikan: Karakter, Kewirausahaan, Penyelarasan, ...
	Layanan Informasi Substansi Pendidikan: Garuda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Glosarium,...



Peta Jalan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas





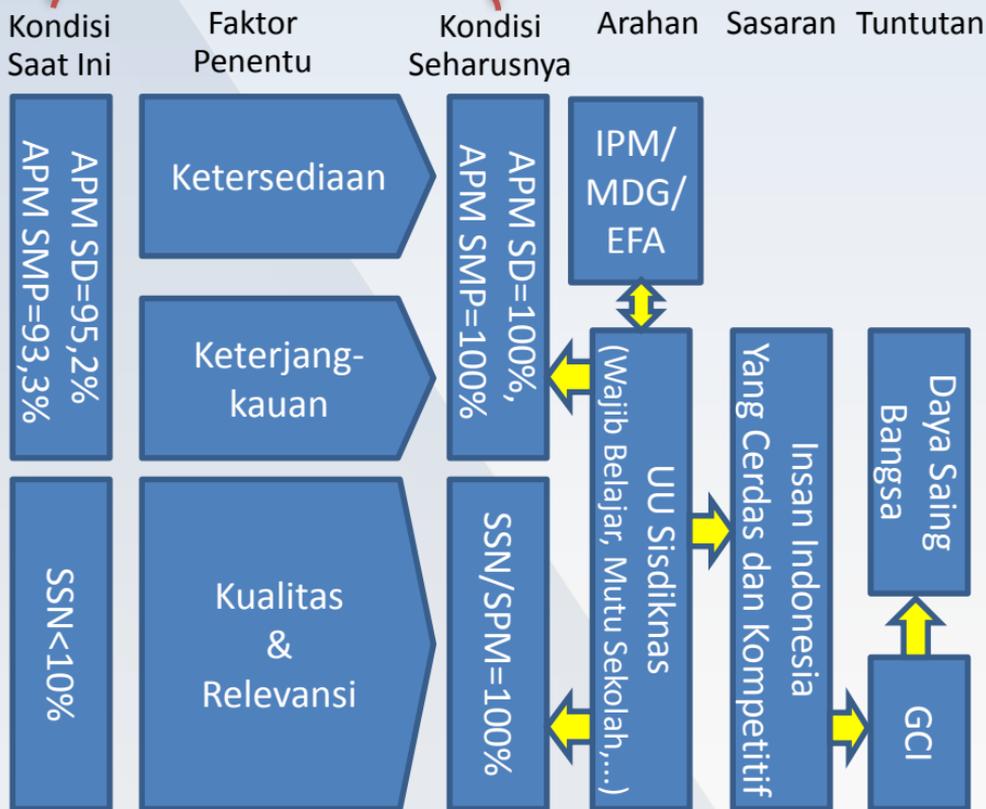
Bagian II

Penguatan Organisasi Kemdiknas



Permasalahan Utama Pendidikan Nasional

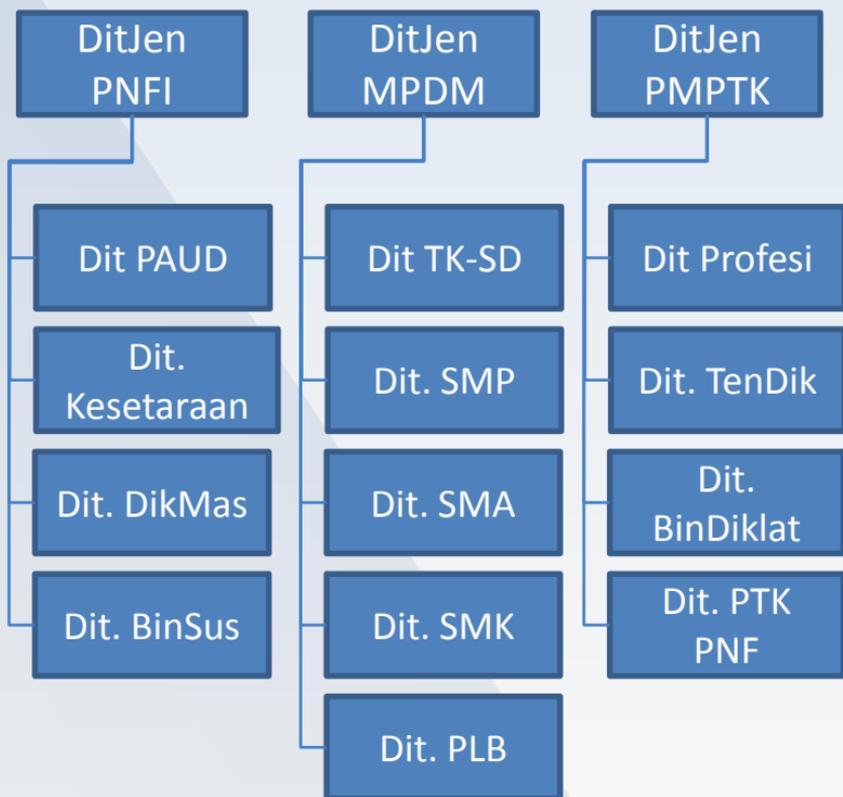
Kesenjangan



- GCI : Global Competitiveness Index
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
MDG : Millenium Development Goals
EFA : Education For All
APM : Angka Partisipasi Murni
SSN : Sekolah Berstandar Nasional
SPM : Standar Pelayanan Minimum



Struktur Lama Organisasi Kemdiknas



Penanganan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD : TPA, KB, dan TK / TKLB), Pendidikan Dasar (SD / SDLB, dan SMP / SMPLB), Pendidikan Menengah (SMA / SMALB, dan SMK), Pendidikan Nonformal-Informal (PNFI) dalam struktur organisasi Kemdiknas yang lama ditangani oleh tiga direktorat jenderal dengan pembagian tugas dan fungsi seperti tampak pada struktur diatas.



Permasalahan Terkait Struktur Organisasi Lama

- Ditinjau dari pencapaian target pendidikan (seperti pemenuhan APM dan SPM), masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi diantara tiga Direktorat Jenderal (MPDM, PMPTK, dan PNFI), sehingga:
 - > Saling lempar tanggung jawab bila ada masalah.
 - > Saling berebut anggaran dan kegiatan.
 - > Terjadi inefisiensi karena kegiatan yang sejenis dilakukan oleh beberapa unit kerja sehingga tidak dapat berbagi sumberdaya (*resource sharing*).
- Tidak dapat menjalankan fungsi pendidikan secara utuh karena pembinaan terhadap komponen-komponen pendidikan dilaksanakan terpisah pada tingkatan direktorat jenderal, yang lebih sulit koordinasinya dibandingkan bila pada tingkatan yang lebih rendah (Contoh: Penanganan PTK terpisah dari satuan pendidikan).
- Tangung jawab terhadap pelaksanaan misi Kemdiknas untuk tiap jenjang tersebar di beberapa Direktorat Jenderal (Contoh: Pemenuhan APM dan SPM).
- Pembagian struktur yang masih campur aduk antara pendekatan jenjang/jalur dan pendekatan fungsi/komponen (Contoh: MPDM (jenjang) dan PMPTK (fungsi/komponen)).



Ilustrasi: Kontributor Pemenuhan APM Saat Ini





Kerangka Pikir Penguatan Organisasi Kemdiknas

Jumlah PTK harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ketersediaan sarana-prasarana

Kompetensi PTK harus disesuaikan dengan proses pembelajaran

Jumlah dan kompetensi PTK diperlukan untuk penentuan/ peningkatan status lembaga

Sertifikasi PTK dan pemenuhan persyaratannya harus didasarkan pada proses pembelajaran

APM (Angka Partisipasi Murni) pendidikan dasar dan menengah masih jauh dari nilai ideal

Sarana prasarana sekolah tidak dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan

PTK pendidikan formal tidak dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan

Guru kesulitan memenuhi persyaratan beban mengajar 24 jam/minggu dari pendidikan formal saja

- Dalam sistem pendidikan, jumlah dan kompetensi PTK **bukan variabel bebas**
- Pengelolaan PTK **harus terintegrasi** dengan komponen sistem pendidikan yang lain: peserta didik, sarana-prasarana, proses pembelajaran, kelembagaan

- Perlunya penanganan pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal dengan cara **non-diskriminatif**
- Untuk efisiensi, pengelolaan pendidikan kesetaraan **berbagi sumberdaya** dengan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya

Perlu Penataan Struktur Organisasi & Tugas -Fungsi Unit Kerja

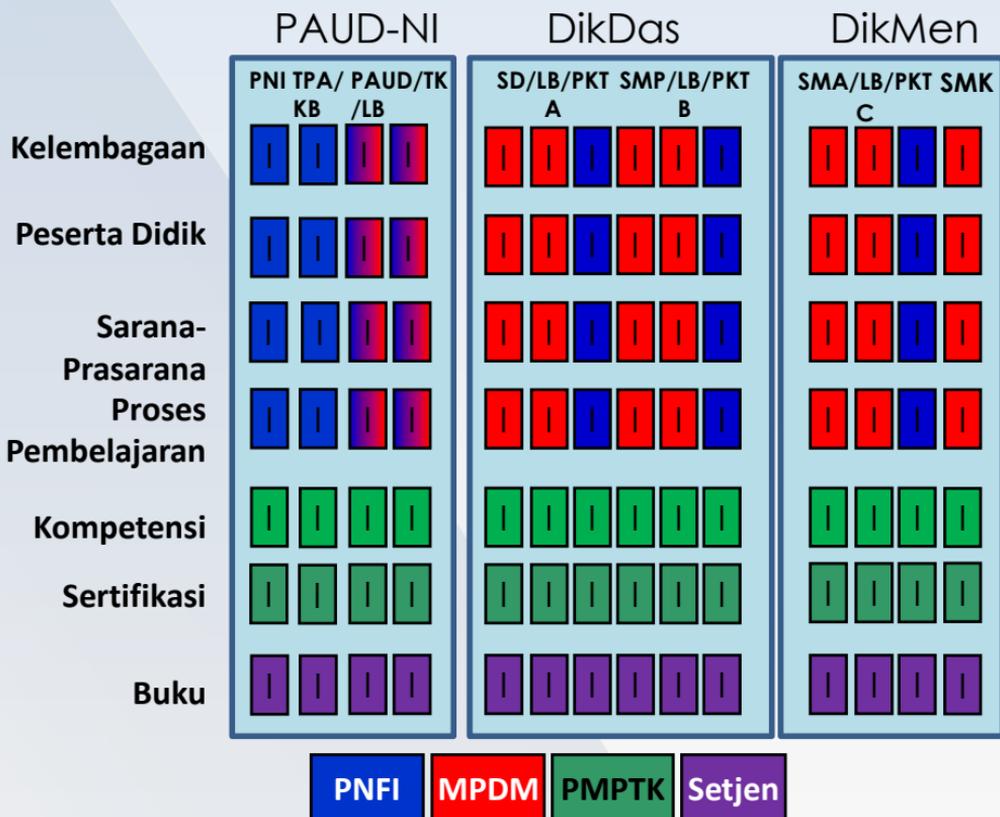
Efisiensi & Efektivitas

Pendekatan:

1. Integratif
2. Nondiskriminatif
3. Berbagi sumberdaya



Peta Struktur Organisasi Lama



Pemetaan jenis layanan yang harus dilaksanakan oleh unit utama Kemdiknas supaya tiap jenjang/jenis pendidikan dapat terselenggara dengan baik adalah seperti tergambar pada peta di atas. Peta pewarnaan ini menunjukkan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas



Pemetaan Jenis/Jenjang vs Layanan vs Unit Utama



Peta struktur organisasi Kemdiknas dapat digambarkan dalam tiga sumbu yang mewakili tiga variabel dalam organisasi Kemdiknas, yaitu variabel layanan, variabel jenis/jenjang pendidikan, dan variabel unit utama. Dari ketiga variabel tersebut, hanya variabel unit utama yang diwakili oleh pewarnaan yang merupakan variabel bebas Kemdiknas



Pendekatan Dalam Penguatan Organisasi

- ⦿ Pergeseran paradigma: dari berbasis **komponen-/fungsi** pendidikan menjadi berbasis **keutuhan** (integratif), yang mensyaratkan satu komponen tidak dapat dipisahkan dari komponen lain.
- ⦿ Pemanfaatan sumberdaya secara bersama (**resource sharing**), agar sumberdaya yang tersedia dalam jumlah sangat terbatas (PTK, Sarana-Prasarana, dan Anggaran) bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi prinsip efisiensi.
- ⦿ Pemberian layanan pendidikan mencerminkan prinsip **kesetaraan**, sebagai implementasi kebijakan inklusifitas dalam pendidikan sebagaimana tertuang dalam setiap tujuan strategis pembangunan pendidikan nasional.
- ⦿ Struktur organisasi dan tata kelolanya harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip rancangan yang baik, seperti **keandalan** dan **produktivitas** sistem.



Peta Struktur Organisasi Baru

PAUD-NI

DikDas

DikMen

	PAUD-NI			DikDas						DikMen			
	PNI	TPA/ KB	TK/ LB	SD/LB/PKT A		SMP/LB/PKT B				SMA/LB/PKT C		SMK	
Kelembagaan	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Peserta Didik	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
SarPras	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Proses Pembelajaran	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Kompetensi	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Sertifikasi	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Buku	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

PAUD&NI

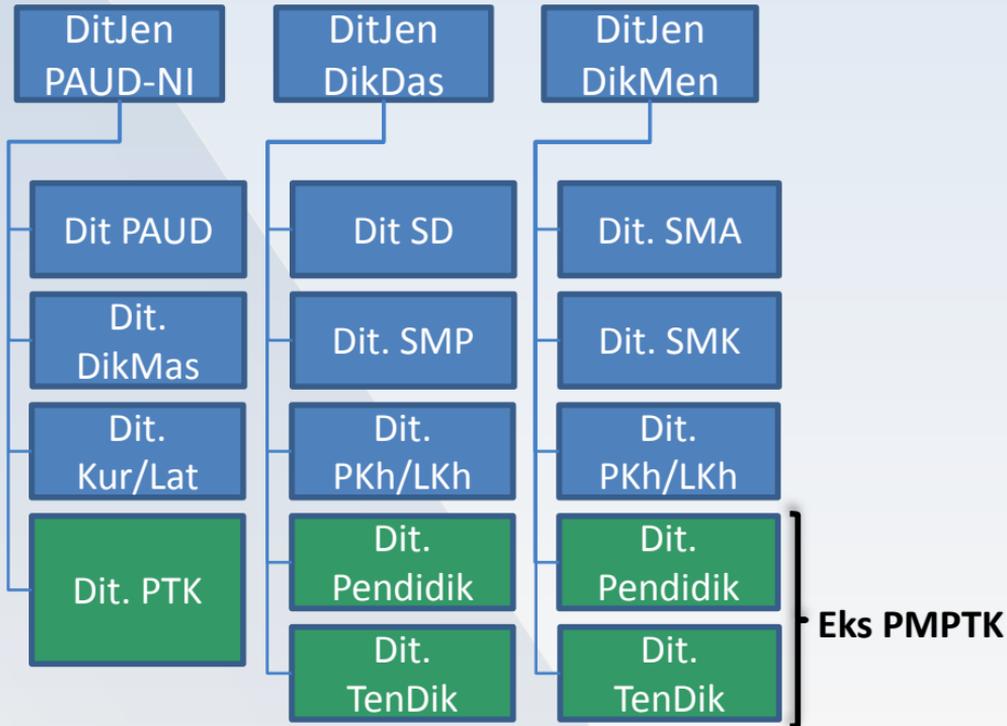
DikDas

DikMen

Dengan melakukan perubahan pewarnaan akan diperoleh peta struktur organisasi Kemdiknas yang baru. Cukup tiga unit utama yang diperlukan menjalankan semua fungsi layanan, dengan satu unit utama bertanggung jawab penuh dalam pembinaan penyelenggaraan tiap jenjang/ jenis pendidikan. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan peningkatan peran dan tanggung jawab. Semua Unit Utama yang terkait dengan penanganan pendidikan anak usia dini, non-formal informal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah mengalami perubahan.



Struktur Baru Organisasi Kemdiknas



Implementasi peta pewarnaan menghasilkan struktur baru organisasi Kemdiknas yang secara konsisten menerapkan pendekatan jenjang /jenis pendidikan. Sebagai bagian dari usaha **memuliakan PTK**, penanganan PTK dilakukan oleh 5 eselon II yang masing-masing mena-ngani PTK pada jenis/jenjang pendidikan tertentu sehingga dapat bekerja lebih cepat dan lebih fokus, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen



Kelebihan Struktur Organisasi Baru

- Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan melalui:
 - Kompetisi antar unit utama dalam pemberian layanan sejenis (contoh: sertifikasi, pemenuhan APM, dan lain-lain).
 - Penanganan terpadu fungsi pendidikan dalam satu unit utama (contoh semua fungsi dan komponen Pendidikan Dasar ditangani oleh satu unit utama).
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan melalui pengelompokan tujuan sejenis dalam satu unit utama sehingga sumber daya terbatas yang dimiliki dapat dipakai bersama (*resource sharing*). Contoh: Pendidikan Dasar mencakup juga Paket A dan Paket B.
- Pengurangan potensi friksi antar unit utama karena tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Contoh: tidak terjadi rebutan anggaran dan peserta didik antara program pendidikan SD dan Paket A.
- Pendidik dan tenaga kependidikan lebih dimuliakan karena disatukan dengan satuan pendidikan dan peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.



Kelebihan Struktur Organisasi Baru (Lanjutan)

- Adanya tambahan tugas dan fungsi baru, yaitu pendidikan layanan khusus yang selama ini belum dilaksanakan secara terprogram.
- Penggunaan pendekatan yang konsisten dalam perancangan struktur organisasi (semua direktorat jenderal berdasarkan jenis/jenjang).
- Penekanan pada prinsip kesetaraan dalam arti yang sebenarnya sebagaimana tercermin pada Misi 5K Kemdiknas. Contoh: Paket A yang setara dengan SD pada struktur baru ditangani pada direktorat yang sama.
- Peningkatan produktivitas dengan pembagian kerja yang lebih berimbang, serta peningkatan keandalan struktur organisasi dengan adanya unit lain yang melakukan kegiatan sejenis. Contoh: sertifikasi guru ditangani oleh tiga direktorat berbeda sesuai dengan jenjang/ jenisnya, sehingga tidak terjadi penumpukan beban seperti saat ini.

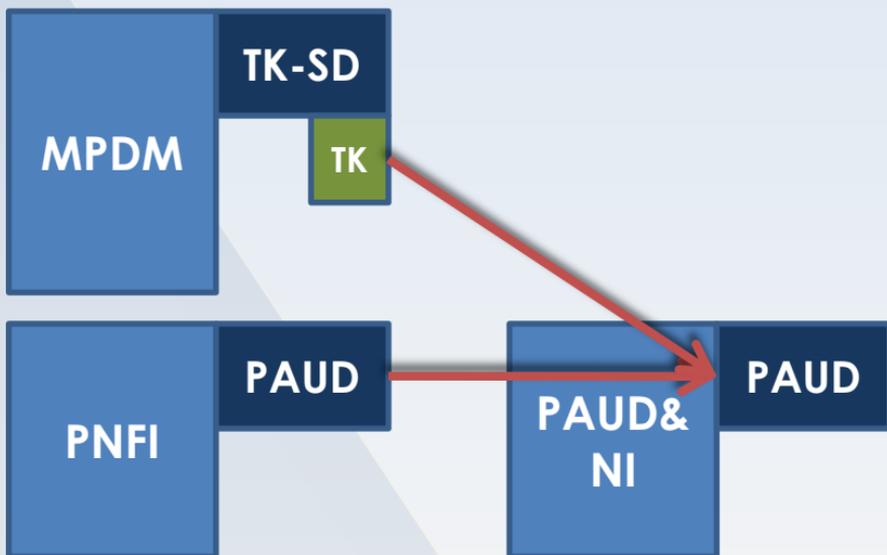


Kontributor Pemenuhan APM dengan Struktur Baru





Ilustrasi: Penanganan PAUD



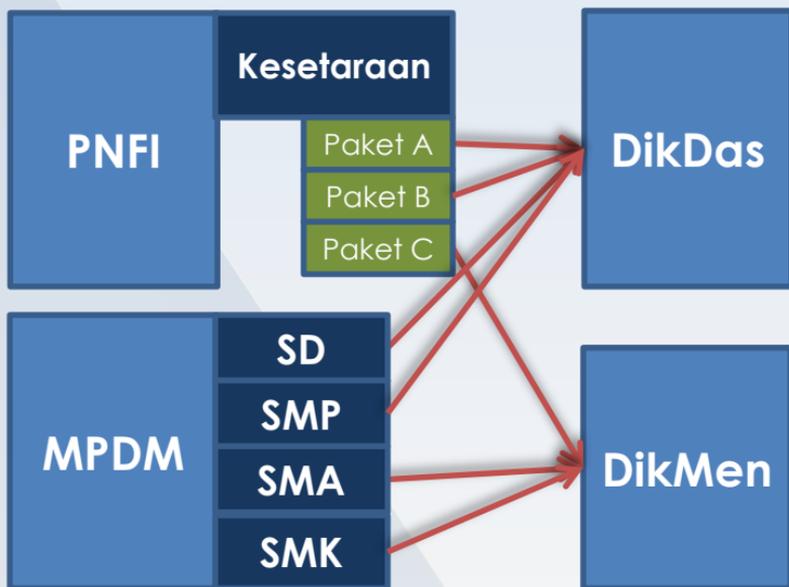
Tujuan yang sama ditangani dengan cara berbeda oleh unit kerja berbeda



Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang sama oleh unit kerja yang sama



Ilustrasi: Penanganan Kesetaraan



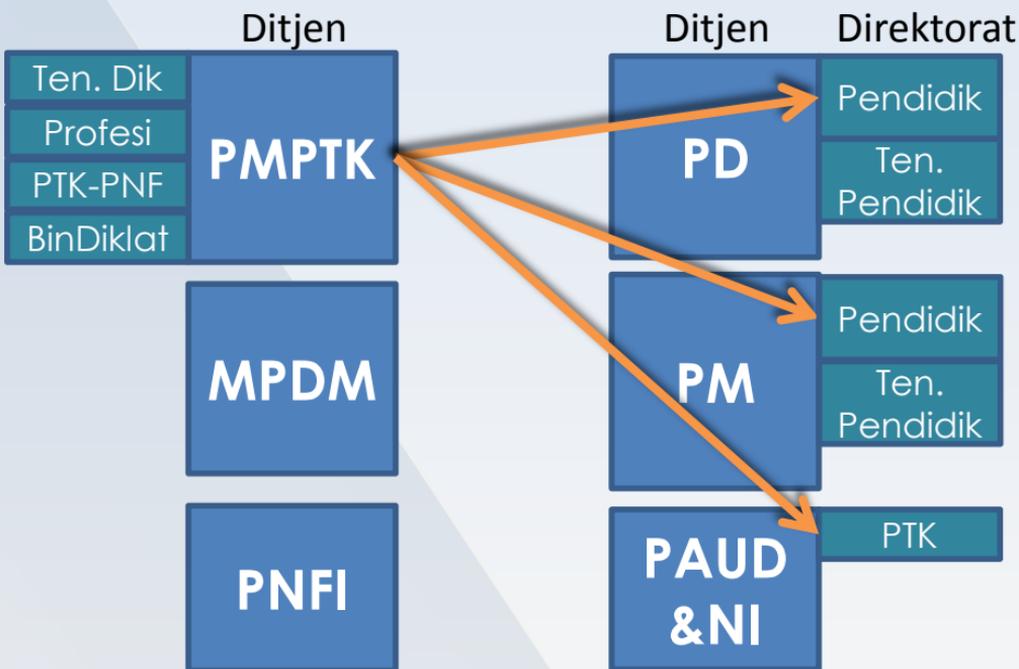
Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang berbeda oleh unit kerja berbeda



Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang sama oleh unit kerja yang sama



Ilustrasi: Penanganan PTK



PTK semua jenjang menjadi tanggung jawab satu Ditjen, sehingga terjadi penumpukan beban kerja dan kurang fokus



PTK ditangani berdasarkan jenjang/jenis pendidikan yang ditanganinya, sehingga menjadi tanggung jawab tiga Ditjen untuk percepatan dan fokus pelaksanaannya



Ilustrasi Produktivitas (Teori Antrian)

**Guru TK, SD,
SMP, SMA, SMK**

Batas Kecepatan+
Ketelitian:



Guru TK

Batas Kecepatan+
Ketelitian:



Guru SD, SMP

Batas Kecepatan+
Ketelitian:



Guru SMA, SMK

Batas Kecepatan+
Ketelitian:

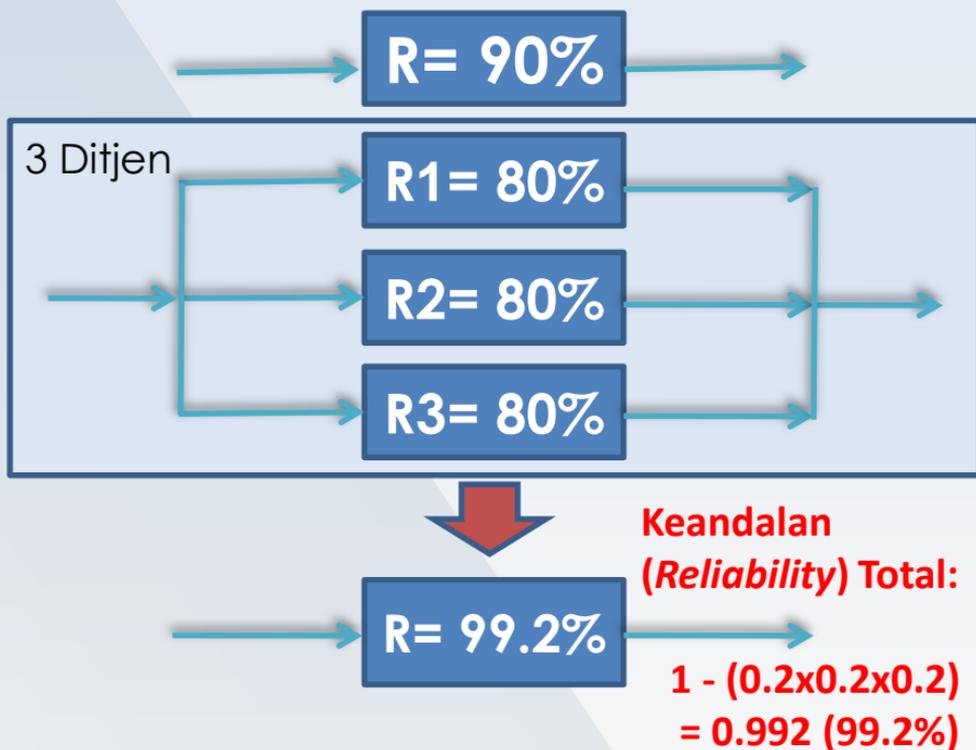


Total 11000 /mg

Dengan pembagian beban sertifikasi guru kepada tiga direktur pada tiga ditjen terpisah dapat mempercepat proses sertifikasi, dengan hasil yang lebih akurat mengingat tiap direktorat menangani guru pada jenjang-jenis pendidikan tertentu, sehingga lebih fokus karena permasalahannya lebih homogen



Ilustrasi Keandalan (Teori Keandalan)



Dengan adanya penanganan peningkatan mutu PTK secara paralel, selain meningkatkan produktifitas, juga akan meningkatkan keandalan proses penanganan tersebut. Teori keandalan memberikan rumusan matematis bahwa ketidakandalan sistem paralel adalah sama dengan perkalian ketidakandalan masing-masing komponen, sehingga keandalannya dapat dihitung seperti di atas.



Perpres 24/2010 Pasal 436 : Susunan Organisasi Kemdiknas

- Wakil Menteri
- Sekretariat Jenderal
- Ditjen PAUD dan NI
- Ditjen Pendidikan Dasar
- Ditjen Pendidikan Menengah
- Ditjen Pendidikan Tinggi
- Inspektorat Jenderal
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
- SAM Hukum
- SAM Sosial dan Ekonomi
- SAM Kerjasama Internasional
- SAM Organisasi dan Manajemen
- SAM Budaya dan Psikologi Pendidikan

Merah: Berubah, Hitam: Tetap, Biru: Penambahan



Kesimpulan

- ◉ Kemdiknas melakukan reformasi secara komprehensif terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam usaha memenuhi MISI 5K dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, baik bagi Kemdiknas maupun para pemangku kepentingan pendidikan yang harus dilayaninya.
- ◉ Struktur organisasi baru Kemdiknas disusun berdasarkan analisis yang mendalam dan komprehensif dengan mengedepankan:
 - > Keutuhan penanganan keseluruhan proses pendidikan oleh tiap unit utama (**Integratif**)
 - > Kesamaan tujuan pendidikan dalam satu unit (**Inklusif/non diskriminatif**)
 - > Perbandingan kinerja dalam penanganan tugas yang sama untuk memacu motivasi kerja (**Motivatif**)
 - > Pemanfaatan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan (**Efisien dan Efektif**)
 - > Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit utama dengan pendekatan yang konsisten (**Konsistensi**)

Tanggap Dalam Melayani Berlomba Meraih Prestasi



**bijak memberi teladan
gigih menciptakan peluang
sabar memberi dorongan**